

BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat “Badan Publik Informatif”

Jakarta (14/12/2022) – BPJS Kesehatan kembali mendapat penghargaan sebagai “Badan Publik Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang digelar Komisi Informasi Pusat RI. BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari 122 Badan Publik yang memperoleh Badan Publik Informatif dari total 372 Badan Publik. Penghargaan diterima oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti disaksikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (14/12).

“Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mutlak dilakukan badan publik terlebih yang secara langsung melayani masyarakat seperti BPJS Kesehatan. Tentu pencapaian ini merupakan hasil dari upaya seluruh Duta BPJS Kesehatan yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta dalam menghimpun, mengelola, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik,” kata Ghufron.

Terdapat lima klasifikasi yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Status “Informatif” merupakan klasifikasi penghargaan tertinggi. Dari penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, BPJS Kesehatan berhasil meraih nilai 94,03 dari skor total 100 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan penganugerahan ini adalah salah satu upaya untuk terus memajukan implementasi keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik di Indonesia. Hal ini mengingat, keterbukaan informasi publik adalah hal yang esensial, fundamental serta wujud penerapan Good Governance dan Clean Governance.

“Tahun 2022, dari hasil monitoring dan evaluasi, jumlah badan publik yang masuk dalam kategori informatif melebihi target RPJMN. Target Bappenas, 94 Badan Publik pada tahun ini sudah berpredikat informatif, namun dalam pelaksanaannya melebihi target yaitu 122 Badan Publik sudah berstatus informatif,” kata Donny.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD mengungkapkan Indonesia harus memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel, dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga negara. Salah satunya adalah mendorong akses informasi keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri pemerintahan demokrasi.

Demokrasi memberikan jaminan atas partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Akses informasi merupakan bagian penting dalam partisipasi publik khususnya dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pemenuhan hak informasi juga merupakan elemen penting dari Hak Asasi Manusia. Menkopolkam juga menyorot perkembangan teknologi yang mempercepat pergerakan alur informasi di masyarakat.

“Apabila badan publik menyembunyikan informasi yang seharusnya dapat dibagi ke publik, dikhawatirkan di era keterbukaan informasi saat ini, khususnya melesatnya penggunaan media sosial akan terjadi kegaduhan dan lebih jauh dapat mengancam ketahanan nasional. Untuk itu sebagai badan publik harus mampu mengimbangi dengan informasi yang benar, harus proaktif menyebarkan informasi secara akurat dan terpercaya, agar dapat menangkal informasi yang bersifat hoaks,” kata Mahfud.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Care Center 165

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

PRESS RELEASE**BPJS Kesehatan Maintains the Title of “Informative Public Agency”**

Jakarta (14/12/2022) - BPJS Kesehatan once again received an award as an "Informative Public Agency" in the 2022 Public Information Openness Award which was held by the Indonesian Central Information Commission. BPJS Kesehatan is one of 122 Public Bodies that received Informative Public Bodies predicate, out of a total of 372 Public Bodies. The award was received by the President Director of BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, witnessed by the Indonesian Coordinating Minister for Politics, Law and Security, Mahfud MD, in Jakarta, Wednesday (14/12).

"Disclosure of public information is something that is absolutely necessary for public agencies, especially those that directly serve the community, such as BPJS Kesehatan. Of course, this achievement is the result of the efforts of all BPJS Kesehatan Ambassadors who consistently apply the principles of transparency, accountability, and good governance in the implementation of the National Health Insurance Program (JKN) and in collecting, managing and providing information needed by the public," said Ghufron.

There are five classifications determined by the Central Information Commission, namely Informative, Towards Informative, Quite Informative, Less Informative, and Not Informative. "Informative" status is the highest award classification. From an assessment conducted by the Central Information Commission, BPJS Kesehatan managed to score 94.03 out of a total score of 100 for the category of State Institutions and Non-Ministry Government Institutions.

Chairman of the Indonesian Central Information Commission, Donny Yoesgiantoro said this award was one of the efforts to advance the implementation of public information disclosure for all public bodies in Indonesia, since public information disclosure is essential, fundamental and a manifestation of the implementation of Good Governance and Clean Governance.

"In 2022, from the monitoring and evaluation results, the number of public bodies that fall into the informative category exceeds the RPJMN target. Bappenas' target is that 94 Public Bodies this year have informative status, and the result showed that it has exceeded the target with 122 Public Bodies got informative predicate," said Donny.

Meanwhile, the Indonesian Coordinating Minister for Politics, Law and Security, Mahfud MD, revealed that Indonesia must promote inclusive, just, and accountable democracy by prioritizing the interests of all citizens by encouraging access to information and disclosure of public information, which are the characteristics of democratic government.

Democracy guarantees public participation in policy making. Access to information is an important part of public participation, especially in government policy making. Fulfillment of the right to information is also an important element of Human Rights. The Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs also highlighted technological developments that accelerate the flow of information in society.

"If a public agency hides information that should be shared with the public, it is feared that in the current era of information disclosure, especially the rapid use of social media, there will be uproar and further threaten national security. For this reason, as a public body, it must be able to balance with correct information, it must be proactive in disseminating information accurately and reliably, so that it can ward off hoax," said Mahfud.